

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian peneliti membutuhkan beberapa artikel terkait yang berupa jurnal atau skripsi yang terakait untuk menambah pengetahuan dan memperkaya pemikiran peneliti terkait teori-teori yang terdapat pada penelitian terdahulu. Tentunya dalam penelitian terdahulu peneliti tidak mendapati peneletian yang sama dengan judul yang peneliti kaji lebih dalam. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai referensi penambah penegtahuan :

1. Rista Wahyu Puspita Sari dan Lena Satlita, M.Si., FIS, UNY. 2018. Yang Memiliki Judul Difusi Program Kampung Keluarga Berencana Di Desa Kanoman Kabupaten Klaten.

Penelitian ini mengarah pada pemahaman dan pengetahuan tentang difusi program kampung kb di Desa Kanoman, Difusi Inovasi lebih di dominasi Komunikasi yaitu komunikasi tatap muka , kelompok dan media masa. Adapun terdapat permasalahan yang di hadapi yaitu terjadinya kevakuman atau pemberentian program kerja di karenakan kurang nya dana desa yang belum cair akhir tahun 2017 hingga April 2018 .

Terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam berjalan nya program kampung KB ini dimana Faktor penghambat utama adalah dana Desa , sedangkan faktor pendukung nya antara lain Sumberdaya manusia yang mendukung , Sering adanya rapat antara warga

dan pemerintah Desa dan yang terakhir adanya monitoring dari pemerintah daerah yang berwenang seperti BKKBN kabupaten klaten.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Metode penelitian Deskriptif dan menggunakan pendekatan Kualitatif serta menggunakan indikator menurut Everett M.Rogers. dalam difusi inovasi program .Kampung KB di Desa kanoman sudah di lakukan sesuai dengan indikator , tetapi dalam pelaksanaan program ini terdapat hambatan antara lain pendanaan dari pemerintah desa, kurang nya aliran dana pada program ini membuat beberapa program kerja dan kegiatan program kampung KB ini macet di tengah jalan, serta belum adanya tempat layak, masayrkat yang masih enggan ber KB dan belum adanya sebuah faktor pendukung kampung KB seperti GENRE dan BKR(Bina Keluarga Remaja)(Inovasi et al., 2018).

2. Linda Ratna Sari ,2018.yang berjudul Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Kampung KB Di Kabupaten Jombang.

Dalam penelitian yang di lakukan oleh Linda ini bertujuan untuk menganalisis beberapa faktor yang bisa mempengaruhi Keberhasilan Program Kampung KB yang terdapat pada 3 Kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang. Analisis yang di gunakan peneliti adalah dengan menyebar sampling yang random ke 25 orang. Dengan menggunakan metode penelitian korelasional dengan variabel dan teori yang di gunakan Edward. Terdapat beberapa faktor agar kampung KB ini berhasil dimana komunikasi antara petugas PLKB, Pemrintah Desa dan Pemerintah

Kabupaten tidak lupa juga masyarakat sebagai tempat dan pelaku kampung KB, beberapa faktor lain yaitu sumberdaya yang mendukung, sikap dan keterampilan dari masyarakat setempat yang di tempati kampung KB.

Peneliti menarik kesimpulan sumberdaya merupakan faktor penting di dalam mencapai keberhasilan pada Program kampung KB, faktor lainnya yaitu disposisi tetapi berperan lemah terhadap pencapaian keberhasilan program Kampung KB di Kabupaten Jombang . sedangkan pengaruh positif lainnya yaitu Komunikasi, Sumberdaya, disposisi, dan terakhir struktur Birokrasi yang mempengaruhi keberhasilan Program Kampung KB, menurut warga sendiri bahwa petugas yang bertugas menjalankan Kampung KB sudah Mengimplementasikan nya tetapi faktor masyarakat yang masih bersifat pasif membuat macetnya beberapa program ini berjalan tidak lancar terjadi simpang siur di sebabkan oleh minimnya inisiatif langsung dari masyarakat serta peran pemerintah Daerah dan pemerintah Desa agar melaksanakan intervensi berbagai program Kampung KB yang berada di wilayah Kabupaten Jombang(Sari, Raikhani, Yunas, & Hariastuti, 2018).

3. Rachmadanti, 2019. Berjudul Komunikasi Interpersonal Pengurus Pokja Kepada Warga Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Kampung KB Malangrejo, Wedomartani.

Kampung KB bukan sekedar tentang program yang di bentuk untuk mencegah pembludakan penduduk tetapi Kampung KB sendiri juga berupaya dalam menaikkan taraf kehidupan masyarakat mengentaskan dari

garis kemiskinan. Dalam penelitian ini peneliti melihat bahwa kepuasan hidup, pengalam hidup, pengalaman hidup dan kesejahteraan yang di miliki menjadi indikator penilaian kualitas hidup masyarakat. Serta peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan Kualitatif dan teori yang di gunakan adalah teori komunikasi Interpersonal.

Meningkatnya taraf hidup masyarakat di berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dll, melalui pokok kegiatan dan program intervensi pada Kampung KB Malangrejo. Kesimpulan dari penelitian ini adalah komunikasi interpersonal yang tertata di antara pengurus pokja terhadap warga mampu meningkatkan hubungan antara keduanya. kesetabilan antara warga dan Pokja yang terjalin dapat menjadi salah satu awal yang baik dalam memulai sebuah program kampung KB agar tercapainya sebuah hidup masyarakat yang bertaraf tinggi di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi sehingga masyarakat merasakan adanya program ini dan manfaat yang di rasakan secara keseluruhan (Rachmadanti, 2019).

4. Erwin Saputra, 2018. Berjudul Analisi Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi , Informasi Dan Edukasi (KIE) Program Keluarga Berencana (KB) Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.

Penelitian yang dilakukan Erwin menganalisis pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dan program KB (keluarga berencana) serta mampu melihat kendala di dalam pelaksanaanya di Kota Pekanbaru oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan

cara mengambil beberapa sample masyarakat yang sudah di nilai mewakili masyarakat secara keseluruhan.

Dengan metode penelitian Deskriptif Kualitatif dan teori Fredich yang mendefinisikan bahwa kebijakan public adalah serangkaian tindakan / kegiatan yang di usulkan oleh individu maupun kelompok. dalam penelitian ini dapat di ketahui bahwa pelaksanaan kegiatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) di dalam kategori pelaksanaanya adalah kurang baik belum berjalan sesuai yang diinginkan dimana di lihat dari masih terdapatnya masyarakat yang belum mengetahui pengetahuan tentang kontrasepsi program keluarga berencana serta kurangnya sikap praktik masyarakat yang ikut serta di dalamnya masyarakat masih cenderung acuh,

Dari sini peneliti menarik kesimpulan bahwa pemerintah atau dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sudah mensosialisasikan terhadap masyarakat tetapi di di sini masyarakat masih ada yang belum merasakan dan tahu menahu , konseling yang di lakukan oleh dinas juga sudah sesuai dengan peraturan pemerintah pusat tetapi masih belum bias memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri

Terdapat juga faktor penghambat kendala yang terjadi antara lain masalah dan waktu oleh masyarakat yang cenderung sibuk dengan urusan masing masing saat Dinas mensosialisasikan dan kendala satunya adalah sumberdaya manusia yang belum secara keseluruhan mendukung yang mampu mendukung program-program tersebut(Saputra, 2018).

5. Arizqi Istiadi. 2017. Berjudul Implementasi program Kampung Keluarga Berencana (Studi pada Sasaran Keluarga Remaja Di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk).

Program Kampung KB adalah salah satu program yang di inovasi oleh pemerintah untuk meningkatkan program KKBPK dengan tujuan mempersempit ruang sasaran yang di incar merupakan tingkatan Kelurahan/Desa.

1. Komunikasi yang berisikan transmisi yang di lakukan dengan sosialisasi dan di berikan sebuah penejlasan, pembekalan, masih belum di pahami secara betul oleh masyarakat sendiri.
2. Sumber daya yang sudah di miliki sudah cukup mampu sedangkan anggaran sudah cukup tetapi fasilitas yang di berikan hanya sebuah tempat sosialisasi dan buku panduan saja.

Dari beberapa permasalahan yang di sebutkan peneliti memberikan pendapat bahwa hambatan yang ada pada program kampung KB adalah disposisi yang terdapat sikap dan juga insentif di sini mengalami sebuah hambatan dimana hambatan tersebut berada pada disposisi sikap yang di berikan oleh implementor yaitu kader yang kurang kompeten atau maksimal dalam pelaksanaan program kampung KB.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan penjelasan kualitatif, dengan teori model implementasi oleh George Edward III yang mengangkat 4 indikator yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Peneliti menarik kesimpulan dalam indikator komunikasi di ketahui bahwa penyampaian informasi

yang di berikan terkait program kampung KB di Desa Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ini sudah cukup baik. Namun informasi yang di berikan juga belum begitu sesuai dengan harapan karena sasaran kegitan masih banyak sebagian besar masyarakat yang kurang tertarik dan juga tidak paham betul terkait program Kampung KB(Istiadi & Rosdiana, 2012).

6. Maharto.2018. judul Implementasi Kebijakan Tentang Program Kampung Keluarga Berencana Menuju Terwujudnya Keluarga sejahtera Di Kabupaten Cirebon.

Pasca otonomi daerah kampung Keluarga Berencana di nilai kurang bergema, program Kampung Keluarga Berencana merupakan program yang mendukung KKBPK tetapi sejauh ini pelaksanaannya belum berjalan baik dan implementasinya juga belum terwujud untuk Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Cirebon. Hal ini di sebabkan karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat setempat dan hambatan di SDM yang masih belum dapat menerima penjelasan Petugas , sarana prasarana yang belum mencapai kata mampu dan memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri, serta lingkungan dari masyarakat yang masih terbilang kumuh, yang terakhir evaluasi yang minim di adakan pada Program Keluarga Berencana di Kabupaten Cirebon.

Metode Kualitatif yang di gunakan peneliti yang cenderung lebih memahami fenomena subjek. Serta menggunakan beberapa faktor yang mempengaruhi suatu implementasi yang di adopsi dari pendapat ilmuwan

Grindle yang memiliki pandangan bahwa faktor content of policy dan context of implementation yang berhubungan dengan pelaksanaan kepentingan, program serta sumberdaya dan manfaat(MAHARTO, 2018).

7. Jumadi Syawal.2019, berjudul Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

Penulis mengangkat masalah bahwa permasalahan besar Negara adalah membludaknya pertumbuhan penduduk yang terus meningkat yang mempengaruhi Indonesia sebagai Negara berkembang, dengan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat tinggi dalam keikutsertaan dalam Kampung KB dan bagaimana pencapaian keberhasilan dari Program Kampung KB. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teori kebijakan public yang dikemukakan oleh Anderson yang mendefinisikan bahwa Kebijakan public merupakan suatu kebijakan-kebijakan yang di besarkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah Negara tertentu (Syawal, 2019).

8. Maqrifa Wahyu Perdana, 2019. Berjudul Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) dalam Membentuk Karakter Masyarakat di Desa Krecek, Kecamatan Badas, kabupaten Kediri.

Indonesia yang merupakan Negara dengan besar penduduk nomor empat terbanyak yang menjadi masalah karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dapat berakibat pada tingkat kesejahteraan penduduk

itu sendiri. Dalam penerapan kampung KB apakah sudah membentuk sifat masyarakat Desa Krecek Kecamatan Badas Kabupaten Kediri , implementasi Program Kampung KB dalam pembentukan karakter masyarakat apakah sudah sesuai, apa saja hambatan nya dalam penerapannya salah satunya dalam Bina Keluarga Remaja (BKR).

Peneliti menggunakan metode Kualitatif dengan desain deskriptif dengan menganalisis data yang sudah di dapat , adapun teori yang di gunakan adalah menggunakan teori yang di kemukakan oleh Merille S Grindel yang menjabarkan jika terdapat beberapa variable terdapat sejumlah 2 variabel penting yang berdampak pada implementasi adalah isi kebijakan dan lingkungan implementasi itu sendiri(Wahyu Perdana & Suyanto, 2019).

9. Encup Supriatna,Rira Ristani.2018. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS SEJAHTERA DI KABUPATEN PANGANDARAN. Jurnal Ilmu Sosial dan ilmu Politik Vol.8 No.2 Tahun 2018.

Raskin / Rastra merupakan salah satu program yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Program tersebut merupakan program bantuan dari Pemerintah kepada masyarakat berupa beras bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan akses dalam pemenuhan hak dasar masyarakat kurang mampu terhadap kebutuhan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pembunuhan raskin / rastra desa Babakan dan untuk mengetahui kendala dan kendala yang dihadapi dalam pendistribusian dan pengelolaan desa

Raskin / Rastra Kecamatan Babakan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Dalam studi teori Implementasi kebijakan publik dengan George c. Edward III . Dalam pendekatan ini terdapat empat variabel untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sedangkan untuk metode yang di lakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang di dukung dengan metode lainya seperti metode penelitian Administratif Publik, sosial dan bisnis.

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembunuhan Beras miskin / Beras sejahtera Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal. Dengan menarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Program Raskin/Rastra di Desa Babakan belum berjalan secara optimal sebagaimana mestinya dimana dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Raskin/rastra masih mengalami beberapa hambatan. Sebagaimana di ketahui bahwa variabel yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan, Keempat variable tersebut, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Supriatna & Ristanti, 2018).

10. Engkus.2020.KOMUNIKASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI MELALUI E-WARONG.Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 23 No. 1, Juli 2020: 47- 60 ISSN: 1410-8291-ISSN: 2460-0172

Masalah utama dari penelitian ini adalah komunikasi kebijakan pemerintah pusat di level kelurahan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum berjalan optimal. Faktor yang menyebabkan yaitu

komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap implementer) dan struktur birokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi komunikasi kebijakan pemerintah pusat berupa bantuan nontunai di level terendah di kelurahan. Juga untuk mengetahui apakah program E-Warong diberikan tepat sasaran pada Keluarga Penerima Manfaat sehingga kemiskinan berkurang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Kami merekomendasikan agar terjalin komunikasi kebijakan melalui advokasi dan pengawasan. Diharapkan di masa mendatang terdapat data KPM yang akurat, sah, dan dapat dipercaya.

Dengan kesimpulan bahwa Komunikasi kebijakan BPNT ini sudah terlaksana, namun belum optimal. Dimensi komunikasi, proses komunikasi pemerintah pusat dan kelurahan masih belum lancar, berakibat lemahnya peran dan fungsi kelurahan sebagai garda terdepan. Dimensi sumber daya masih selalu tergantung ke pemerintah pusat dalam segala tindakannya, sehingga komunikasi KPM dengan pemberi manfaat (pemerintah pusat/Kemensos) tidak jelas. Artinya kewenangan kelurahan masih lemah. Dimensi disposisi, pemahaman perintah, komunikasi antara pemberi manfaat, dengan pihak kelurahan, KPM, penyalur bantuan masih terputus. Dimensi struktur birokrasi, belum jelas, sehingga data yang tersedia belum mutakhir, yang berakibat program tidak tepat sasaran. Hal

ini terjadi karena tidak adanya petugas yang berperan menjembatani sebagai advokasi dan pengawas di tingkat lapangan (Engkus, 2020).

11. Thoriq Ramadani.2019.Pengelolaan Komunikasi Publik.Jurnal Good Governance Volume 15 No. 1 Maret 2019

Penelitian ini berupaya menemukan jawaban tentang bagaimana implementasi pengelolaan komunikasi publik di Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. Dengan melihat implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengelolaan komunikasi public yang di kemukakan oleh GeorgeC. Edwards III., yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi serta metode penelitian kualitatif. Diungkap bahwa implementasi sudah berjalan, walaupun masih bisa ditingkatkan. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian informan terkait keterbatasan anggaran dan peralatan yang ada, namun adanya keterbatasan itu tidak mempengaruhi motivasi bekerja dan bahkan menjadi masukkan untuk lebih meningkatkan lagi dalam hal sinergi pengelolaan komunikasi publik ke depan, melalui kerja sama dengan Kementerian/Lembaga Anggota DEN. Peningkatan pengikut media sosial yang signifikan juga menjadi salah satu ukuran pencapaian.

Dengan menarik kesimpulan bahwa implementasi pengelolaan komunikasi publikasi di Setjen DEN diungkap bahwa implementasi sudah berjalan, walaupun masih bisa ditingkatkan. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian informan terkait keterbatasan anggaran dan peralatan yang ada, namun adanya keterbatasan itu tidak mempengaruhi motivasi bekerja dan bahkan menjadi masukkan untuk lebih meningkatkan lagi

dalam hal sinergi pengelolaan komunikasi publik ke depan, melalui kerja sama dengan Kementerian/Lembaga Anggota DEN. Peningkatan pengikut media sosial yang signifikan juga menjadi salah satu ukuran pencapaian (Ramadani, 2019).

Dari beberapa jurnal tersebut memiliki sub bahasan yang terkait dengan judul saya yaitu Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Kampung KB di Desa Giripurno Kota Batu, beberapa penelitian terdahulu menggunakan metode Deskriptif kualitatif seperti metode yang saya pakai tapi ada beberapa metode yang beda seperti penelitian Linda Ratna Sari yang berjudul Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program kampung KB Di Kabupaten Jombang yang menggunakan penelitian korelasional untuk mengetahui tingkat keberhasilan kampung KB di Kabupaten Jombang, untuk teori sendiri dari beberapa penelitian terdahulu menggunakan teori implementasi milik Merilee S. Grindel dan teori kebijakan publik oleh Anderson sedangkan lainnya menggunakan teori yang sama yaitu teori yang dikemukakan oleh Edward III tetapi yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang saya lakukan lebih fokus di komunikasi kebijakan yang terdiri sosialisasi tujuan dan manfaat kebijakan serta dalam pengelolaan kampung KB di Desa Giripurno Kota Batu.

Permasalahan yang melatar belakangi penelitian adalah rata-rata karena pertumbuhan penduduk yang meningkat dan kesejahteraan masyarakat tetapi dalam penelitian yang saya ambil juga memuat suatu permasalahan yang lain seperti pernikahan dini, kebudayaan yang mengakar tentang anak lulus SMA sudah siap di nikahkan tetapi inti dari permasalahan yang saya teliti kenapa dari tahun 2016 hingga sekarang program Kampung KB sendiri belum sampai pada target sasaran

dan visi misinya dalam mendukung dan penguatan program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) . Menurut saya suatu program pemerintah yang di implemntasikan di tengah permasalahan masyarakat memang harus melihat kondisi di lapangan tetapi di setiap langkah yang di lakukan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut perlu ada sebuah faktor utama yaitu komunikasi karena komunikasi di lakukan dalam segala antara pelaku kebijakan dan pemangku kebijakan itu sendiri.

Program Kampung KB sendiri merupakan sebuah inovasi Program dari pemerintah yang di persempit wilayah setingkat RT-RW atau Desa mengapa begitu karena menganggap sebuah Negara dapat di perbaiki dari titik paling dasar dengan menciptakan masyarkat sumber daya manusia yang berkualitas di tingkat keluarga. dengan permasalahan yang mendasari Program Kampung KB secara keseluruhan adalah meningkatkan kehidupan masyarakat baik dalam aspek pendidikan, kesehatan maupun ekonomi karena kampung KB sendiri adalah program yang memang di canang kan oleh presiden RI Joko Widodo sejak Januari 2016 untuk menyiapkan sumber daya manusia yang akan datang yang berkualitas dan berbobot.

Terdapat faktor penghambat yang memang mulai di perhatikan oleh pemerintah dimana anggaran adalah hal utama dalam berjalanya sebuah program , fasilitas berjalanya program tersebut , implementor dan objek masyarakat sendiri. Di sini faktor utama yang melatar belakang judul penulis adalah faktor yang mendasar dan bersifat penting tetapi jarang di perhatikan pemerintah dimana komunikasi adalah faktor yang penting dalam menjalankan program apapun seperti kampung KB perlu adanya sebuah komunikasi yang terjalin antara jajaran

paling atas yaitu pemerintah pusat dengan daerah ke pemerintah kabupaten atau kota komunikasi antara 3 unsur tertinggi ini harus berjalan secara terjalin dan selaras perlunya menghasilkan kader dan pokja yang mampu di terjunkan di situasi bagaimanapun dan kondisi lingkungan yang bagaimanapun , setelah itu baru ke masyarakat yang menjadi objek dari program Kampung Kb sendiri pemerintah harus bias melihat kebutuhan dan permasalahan yang sangat mendasar di masyarakat , dimana hal ini sangat penting karena program ini untuk masyarakat maka perlu adanya survey sesuai kebutuhan masyarakat sendiri.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1. Komunikasi kebijakan Publik

Kebijakan publik yang di buat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan di tengah-tengah masyarakat tidak mudah untuk di implemntasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang di rumuskan oleh pemerintah , dalam implementasi sendiri terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan tersebut seperti yang di kemukakan oleh Edward III dalam terlaksananya sebuah kebijakan terdapat indikator – indikator penting yang mempengaruhi nya dalam teori ini terdapat sebanyak empat faktor dimana faktor pertama Komunikasi Kebijakan di mana faktor Komunikasi ialah proses dimana suatu sosialisasi serta manfaat dari kebijakan dalam hal ini perlunya transmisi informasi yang benar serta kejelasan informasi dalam penyampaian nya untuk mencapai komunikasi antara komunikan dengan komunikator, yang kedua Faktor Sumber Daya dalam faktor yang kedua suatu sumber daya mempengaruhi suatu keberhasilan dari kebijakan yang di terapkan di tengah masyarakat melihat sumber daya pemangku kebijakan sebagai pengimplemen yang mampu menerapkan di

masyarakat dengan benar serta masyarakat yang sebagai sasaran dapat berkesinambungan dengan pemangku kebijakan, yang ke tiga Faktor Disposisi Pelaksana karena disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. dan Faktor yang terakhir Struktur Birokrasi dimana Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan (Istiadi & Rosdiana, 2012).

Penulis akan fokus pada satu faktor utama yang mempengaruhi kebijakan public yaitu komunikasi kebijakan public dimana komunikasi kebijakan publik memiliki 2 jbaran lagi yaitu sosialisasi tujuan kebijakan dan manfaat kebijakan(Istiadi & Rosdiana, 2012).

Secara terminology para ahli mengungkapkan dan memberikan penjelasan yang jelas bahwa Komunikasi di liat dengan sudut pandang Individu, pada buku yang di tulis oleh dani Vardiansyah Menjelaskan berbagai pengertian Komunikasi berdasarakan Istilah yang di kemukakan beberapa ahli(Vardiansyah, 2008):

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Jenis dan Kelly menerangkan “ Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainya”.

Sedangkan menurut penjelasan yang dikemukakan Berelson dan Stainer“ Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka dan lain-lain”

Pendapat lain yang lebih signifikan tentang komunikasi kebijakan publik Menurut Edward III dalam Widodo mengemukakan jika Komunikasi dapat diartikan Proses penerangan informasi komunikator terhadap komunikan. Informasi yang berkesinambungan dengan suatu Kebijakan Publik wajib disampaikan dengan jelas terhadap pelaksana kebijakan supaya pelaksana kebijakan mampu memahami dan mengetahui beberapa hal yang dipersiapkan sesuai kebutuhan dan melaksanakan serta menerapkan kebijakan tersebut secara tepat dan sesuai dengan tujuan dan bidikan Kebijakan Public tersebut(Widodo, 2010). Seperti halnya dalam pelaksana implementasi kebijakan , dalam perencanaan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada BKKBN seluruh provinsi untuk melakukan program Kampung KB yang desentralisasikan kepada setiap daerah yang menerapkan program tersebut pada setiap wilayah setingkat Kelurahan atau Desa perlu adanya sebuah komunikasi yang dimana berisikan sosialisasi tujuan kebijakan program kampung KB dan manfaat kebijakan kampung KB perlu disampaikan kepada masyarakat setempat Desa Giripurno Kota batu agar terjalinya sebuah komunikasi yang baik antara pemerintah Kota/Kabupaten dengan

Pemerintah Desa beserta Masyarakatnya demi tercapainya keberhasilan sebuah program.

Dari pemaparan Edward III dapat di mengerti bahwa sebuah kebijakan publik adalah tanggung jawab semua individu atau kelompok yang berperan dalam kebijakan tersebut , pemahaman atas kebijakan publik yang ada juga di pengaruhi adanya sumberdaya yang mampu, faktor-faktor penghambat, fasilitas sarana dan prasarana juga, jika program kebijakan public Kampung KB di evaluasi dan di monitoring secara bertahap tentu akan tehindari miss komunikasi secara fatal. Serta pemahaman sumberdaya yang memenuhi tersebut juga mampu memahami sosialisasi tujuan kebijakan dan manfaat kebijakan itu sendiri dengan benar.

2.2.2. Pengelolaan

ketika sebuah kebijakan sudah di implementasikan tentu ada sebuah pengelolaan dimana pengelolaan ini mampu menjadi tolak ukur dalam mencapai sebuah keberhasilan kebijakan public pengelolaan POAC merupakan pengelolaan yang sering di gunakan dalam pengelolaan dalam sebuah organisasi pemerintahan maupun swasta , POAC sendiri adalah singkatan dari (Planing, Oraganizing, Actuanting, Controlling) . pengelolaan menurut ahli memiliki pendapat yang berbeda-bedan antara lain :

Pendapat yang pertama yang di kemukakan oleh Balderton di dalam westra menerangkan bahwa istilah pengelolaan bisa di artikan sama denga suatu manajemen dimana memiliki arti yang relevan dengan mengorganisasikan, dan

menjalankan usaha manusia untuk di manfaatkan dengan efektif material dan fasilitas untuk mencapai sasaran(Wesra, Pariata, 1985).

Sedangkan pendapat yang kedua di kemukakan oleh Sokenato yang menjelaskan bahwa pengelolaan dalam administrasi ialah suatu proses ari proses Perencanaan, Pengaturan, Pengawasan, Penggerak hingga mencapai tersampainya tujuan(Soerjono, 1986).

Moekijat juga menjelaskan jika pengelolaan ialah sususan kegiatan atau acara yang berisikan Perencanaan, Pengorganisasian, Petunjuk, Pengendalian dan Pengawasan(Moekijat, 1998).

Sedangkan pendapat selanjutnya yang di kemukakan Hamalik adalah identik dan manajemen merupakan istilah dari peneglolaan, di dalam manajemen sendiri merupakan salah satu proses dalam mecapai sebuah tujuan. Dengan beberapa pendapat ahli di atas mampu kita simpulkan bahwa semua pengelolaan memiliki maksud yang sama dengan manajemen dimana pengelolaan adalah sebuah proses step by step dalam proses bekerja untuk menggapai sebuah tujuan dan sasaran yang di inginkan(Hamalik, 1993).

Pengelolaan berarti bahwa tidak hanya melakukan dan melaksanakan sebuah kegiatan semata tetapi pengelolaan adalah rangkaian dari fungsi-fungsi manajemen didalam nya yang berisikan tiap proses susunya yang pertama Perencanaan, Pelaksanaan, dan yang paling final yaitu suatu Pengawasan demi menggapai suatu target yang di inginkan dengan efektif serta efisien.

Management Pengelolaan POAC (Planing, Organizing, Actuating, Contoling) merupakan tujuan dalam meningkatkan efektifitas dan feisien untuk mencapai tujuan di dalam organisasi :

1. Planing (perencanaan)

Planning, adalah penataan sebuah tujuan dan mencari solusi untuk mencapai tujuan yang di inginkan, pembuat kebijakan harus mampu melihat bagaimana strategi dalam mencapai tujuan nya agar efektif dan efisien. Menentukan suatu keputusan yang di ambil salah satu bagian dalam perencanaan dimana sesuatu yang di pilih dan yang akan di lakukan menurut suatu proses penyelesaian dalam rencana, Planning di butuhkan dan nilai penting karena mampu menjalankan manajemen lainnya.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Organizing, adalah memastikan apa saja yang di butuhkan manusia maupun fisik dari SDM (Sumber Daya Manusia) yang tersedia dalam melaksanakan rencana dan menggapai target yang berkesinambungan terhadap organisasi. *Organizing* berisikan sutu penugasan setiap kegiatannya berbagi tugas di dalam berbagai tugas dan kewajiban yang tersstruktur dan mampu memilih yang berhak menjalankan dan bertugas. Dengan demikian dapat di katakana bahwa kegiatan *Organizing* merupakan kegiatan dalam pemilihan kader dan mencakup saran prasarana tujuan.

3. Actuating (Perencanaan dan Pengorganisasian)

Actuating, menekankan pada pemimpin atau pembuat kebijakan dapat mengarahkan pelaku kebijakan agar berjalan seperti yang diinginkan organisasi, Actuating merupakan rencana yang menjadi tindakan dalam organisasi. Jika di jalankan tanpa sebuah peran dan tindakan yang nyata, sebuah rencana tidak akan berjalan hanya sebuah angan-angan yang tidak pernah terlaksana.

4. Controlling (Mengendalikan)

Controlling, tidak hanya sekedar mengendalikan berjalanya sebuah program dan aktivitas program, namun juga mengawasi sebuah program yang berjalan kalau perlu adanya sebuah koreksi. dengan ini makan program yang di jalankan oleh pelaku akan sesuai dengan apa yang ingin di capai dan tepat sasaran jika terjadi kesalahan maka bisa di lakukan perbaikan sebelum fatal(Karyawan, 2019).

Dari proses pengelolaan di atas menggunakan Management Pengelolaan POAC sudah tercantum pada tugas PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) dan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) di tiap Kecamatan atau Kampung KB yang berada di Desa-Desa.

2.2.3. Kampung KB

Kampung KB atau yang biasa di sebut Kampung Keluarga Berencana merupakan lingkup yang wilayah nya meliputi daerah setingkat RT (Rukun Tetangga), Dusun, atau setingkat wilayah yang memenuhi kriteria tertentu, dalam hal ini terdapat kesinambungan dengan Program KKBPK yang di artikan

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, dan pengembangan serta pembangunan sektor yang berhubungan lalu di laksanakan dengan sistematis dan sistematis(M.Yani, 2018).

Kampung KB atau Kampung Keluarga Berencana merupakan suatu miniature dari pelaksanaan Program KB yang tersusun secara terpadu dan komperhensif dalam tingkatan wilayah Desa, Kelurahan, Dusun, rukun warga , dalam konsep kampung KB yang terpadu terdapat pada kampung KB ini di dalam program ini terdapat pembangunan lainnya di dalamnya seperti Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi. Kampung KB sendiri juga di desain untuk meningkatkan upaya di dalam memberdayakan masyarakat untuk pengelolaan proram KB. Dengan meninjau pula tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar sesuai dengan kategori kesejahteraan. Dalam hal ini Kampung KB memilih tempat dan wilayah seuai dengan kriteria dan memenuhi syarat tertentu yang sudah di tentukan anantara lain :

1. Tersedianya data Kependudukan

Dalam hal ini perlu ada sebuah data jelas tentang penduduk yang berasal dari pendataan keluarga, data potensi yang ada di desa dan data pencatatan sipil yang jelas dan akurat dapat menjadi salah satu alasan prioritas.

2. Dukungan dan Komitmen Pemerintah Daerah

Komitmen dan peranan aktif seluruh instansi , unit kerja pemerintah seperti pemerintah Desa serta Pemerintah Kota/Kabupaten yang ikut serta dan memberi dukungan terhadap berjalanya sebuah program Kampung KB tersebut.

3. Partisipasi Masyarakat yang Aktif

Masyarakat sendiri adalah sasaran dari program Kampung KB sendiri jadi perlu adanya peranan masyarakat sendiri yang aktif dalam ikut serta dalam setiap program nya agar tercapainya sebuah kesinambungan sesuai dengan sasaran dan tujuan(BKKBN, 2015).

